

DI ABAD KE-21: PANCASILA APA MASIH DIPERLUKAN?

Franz Magnis-Suseno, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, magnis.sj@gmail.com

Abstrak

Essay ini akan memperlihatkan bahwa Pancasila bukan hanya tidak ketinggalan zaman, melainkan dapat menjadi dasar kokoh komitmen-komitmen etis yang perlu diberikan oleh bangsa Indonesia apabila mau menghadapi tantangan-tantangan amat serius abad ke-21. Umat manusia sekurang-kurangnya menghadapi lima tantangan hidup mati: krisis demokrasi, ekstremisme ideologis-agamis, tenggelamnya sebagian umat manusia dalam kelaparan, keambrokan lingkungan hidup alami, dan *artificial intelligence*. Sedangkan Indonesia secara khusus ditantang oleh radikalisme agama, perpecahan vertikal antara mereka yang maju dan mereka yang ketinggalan, dan pembusukan demokrasi menjadi oligarki yang korup. *Essay* ini berargumentasi bahwa tantangan-tantangan itu hanya dapat diatasi kalau bangsa Indonesia mengambil komitmen-komitmen etis yang tidak dapat ditawar-tawar. Untuk memperlihatkan bahwa Pancasila adalah yang dapat dan harus mendasari komitmen-komitmen itu, dijelaskan dulu bahwa di masa lampau Pancasila berhasil mengatasi tantangan paling serius yang dihadapi Indonesia: Pemersatuan kemajemukan komunitas-komunitasnya. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia berhasil mendasarkan diri pada keyakinan-keyakinan yang dimiliki bersama sehingga identitas Indonesia tidak mengancam, melainkan mendukung identitas masing-masing komunitas. Namun, Pancasila bukan hanya berdasarkan nilai-nilai tradisi-tradisi budaya Indonesia, melainkan, dan itu penting, sekaligus terbuka bagi lima keyakinan etika politik pasca-tradisional paling mendasar umat manusia: kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, negara kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sedangkan tuntutan yang semakin perlu diperhatikan, yaitu agar kita jangan menghancurkan daya tahan alam, adalah implikasi sila kedua: kita harus bersikap beradab juga terhadap alam. *Essay* ini kemudian menawarkan secara rinci komitmen-komitmen yang terimplikasi jika kita tetap mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan komitmen-komitmen itu ancaman-ancaman abad ke-21 akan bisa ditangani.

Kata Kunci: Pancasila; tantangan abad ke-21; etika politik pasca-tradisional; komitmen yang tidak boleh ditawar-tawar

Abstract

This essay wants to show that Indonesia's state philosophy Pancasila is not only not out of date, but can be the basis of the strong ethical commitments that have to be given if Indonesia wants to handle the extremely serious challenges of the 21st century. The essay points out that humankind faces five life-or-death challenges: the growing crisis of democracy, ideology - mostly religion - based extremism, the sinking of parts of humankind into destitution, the collapse of our natural environment, and artificial intelligence. Indonesia herself is challenged by religious radicalism, vertical splitting between the prospering upper society and the rest that feels left behind, and the sinking of her democracy into corrupt oligarchy. This essay argues that these challenges can only be successfully faced if Indonesia takes ethical commitments that are not negotiable. In order to show that these commitments should be based on Pancasila the essay first explains how at Indonesia's beginning Pancasila succeeded in solving the most serious challenge Indonesia faced: How to unite her hundreds of ethnic, cultural and religious communities. With Pancasila Indonesia based herself on the fundamental social-ethical

convictions these communities owned together. But Pancasila not only expresses the traditional values of Indonesia's communities, but, and this is crucial, is open for the five most fundamental convictions of post-traditional political ethics: Religious freedom, fundamental human rights, nation state, democracy and social justice. The now critical demand that we should live in a way that does not destroy nature can be accommodated in the second principle of Pancasila, "just and civilized humanism": We should behave in a civilized way not only towards other humans, but also towards nature. The essay then specifies what commitments are implicated by Pancasila. Keeping to these commitments the challenges of the 21th century can be handled.

Key words: *Pancasila; challenges of the 21th century; post-traditional political ethics; non negotiable commitments.*

PENDAHULUAN

Akhir Sebuah Ilusi

Pancasila: apa masih diperlukan di abad ke-21 ini? 77 tahun masuk ke abad ke-21 kita berhadapan dengan tantangan-tantangan luar biasa. 77 tahun sesudah Indonesia MERDEKA, 30 tahun sesudah perang dingin berakhir, tiga tahun sesudah kita mulai dihamtam oleh Covid-19 dan setahun sesudah Rusia menyerang Ukraina: Ilusi bahwa umat manusia memasuki masa yang semakin damai sudah menguap. Sesudah Uni Soviet bubar 1991 umat manusia sebentar mengharapkan bahwa kita sekarang masuk ke dalam masa di mana perang terbuka tidak akan terjadi lagi. Runtuhnya resim komunis Soviet seakan-akan membuat jelas bahwa masa depan umat manusia akan berciri demokratis, bahwa negara-negara demokratis tidak akan lagi saling berperang, bahwa dengan pengakuan semakin luas terhadap hak-hak asasi manusia dan kesadaran akan solidaritas global kita menghadapi masa depan yang lebih baik.

Tentu, ini sejak semula sudah sebuah ilusi. Perang, meskipun tidak dalam ukuran perang dunia atau perang nuklir, meletus di mana-mana. Di Balkan di bekas Yugoslavia, di Afganistan, di banyak wilayah di Afrika, di Timur Tengah, dimulai dengan invasi Amerika Serikat ke Irak, kegagalan *the Arabic spring* 2010, invasi Amerika di Afganistan dan Libya, dua negara yang sekarang kacau. Di Afrika misalnya pecah perang saudara kejam dalam dua negara Kristiani: di Sudan Selatan, dan sekarang sudah selama dua tahun di Etiopia. Perang Yaman sejak sepuluh tahun amat sangat mengerikan. Syok terakhir – untuk sementara – kita dapat dengan kejadian tak tersangka bahwa Rusia, suatu negara terkemuka di dunia yang berkesan beradab – *civilized* - melakukan agresi *all out* dengan brutalitas ekstrem terhadap negara tetangga yang tidak mengancam dan tidak memprovokasinya.

Kita barangkali masih ingat buku Francis Fukuyama (1992) "*The End of History and the Last Man*" dimana ia berargumentasi bahwa dengan berakhirnya perang dingin dan pembubaran Uni Soviet perkembangan ideologis umat manusia sudah mencapai tujuannya, dengan demokrasi liberal menjadi bentuk final pemerintahan umat manusia. Fukuyama sekarang betul-betul kelihatan menggelikan. Apa kita dengan Pancasila juga ketinggalan zaman?

PEMBAHASAN

Lima Tantangan Global

Untuk menjawab pertanyaan itu mari kita lihat lebih rinci tantangan yang kita hadapi. Sekurang-kurangnya ada lima tantangan amat sangat serius yang dihadapi seluruh dunia. Tantangan pertama adalah krisis demokrasi. Demokrasi pernah menjadi sebuah harapan. Harapan akan hidup bersama dengan damai, saling menerima, dalam kerangka hukum yang menjamin hak-hak asasi kita semua sebagai manusia dan berdasarkan prinsip non-diskriminasi atas dasar etnik, ras dan agama, yang tidak mengizinkan warga masyarakat tenggelam dalam keterlantaran, yang tidak lagi memakai perang sebagai sarana, tetapi di banyak wilayah bumi demokrasi tidak pernah berhasil, misalnya di Afrika atau di Timur Tengah. Sedangkan demokrasi yang sudah terbangun terancam. Di India minoritas-minoritas Muslim dan Kristiani semakin tertekan. Demokrasi-demokrasi di Amerika Latin –dari Meksiko sampai Chile, hasil penggeseran rezim-rezim militer 40 tahun lalu, sekarang menjadi semakin runtuh. Kemudian, barangkali paling mengkhawatirkan adalah kecenderungan ke polarisasi di negara-negara jantung demokrasi di Barat. Di Amerika Serikat pendukung Republikan siap berperang saudara dengan kaum Demokrat. Di Eropa pun kelompok-kelompok kanan fanatik, ditambah para penganut teori-teori konspirasi, mengancam kesepakatan demokratis.

Tantangan yang kedua adalah ekstremisme ideologis-agamis. Jadi meluasnya ideologi-ideologi eksklusif, kebanyakan bermotivasi agama, yang tidak ragu-ragu memakai kekerasan dan membenarkan terorisme. Ekstremisme agamis itulah yang berada di belakang sebagian besar kehancuran Timur Tengah. Di Afrika gerakan-gerakan *Islamic State*, seperti *Boko Haram* atau *Al Shabab*, sering dengan memanfaatkan perpecahan sosial atas dasar suku, terus menerus meluas. Ekstremisme eksklusif itu, mirip, dan kadang-kadang bersama dengan populisme, menggantikan kata "kita" dengan "kami lawan mereka" dan berada di belakang perang-perang saudara dan terorisme.

Tantangan ketiga adalah ketidakmampuan umat manusia untuk menghapus kelaparan di dunia dan menjamin bahwa segenap penghuni bumi dapat menikmati suatu kehidupan yang sejahtera dan terhormat. Karl Marx dianggap begitu keliru. Marx mengira bahwa kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi-kontradiksi internalnya. Akan tetapi, ternyata kapitalisme membuktikan diri sebagai sistem yang paling unggul dalam mendorong pertumbuhan produksi. Yang menjadi masalah kapitalisme adalah bahwa kapitalisme memecahkan masyarakat ke dalam *winners* dan *losers*. Secara internasional itu berarti: Kapitalisme global akan berfokus pada, dan memajukan, negara-negara yang memberi rangsangan investasi, sedangkan sisanya – para *failed states* – dibiarkan, *they are left to rot*. Kelaparan dan keterlantaran di dunia akan bertambah tajam. Katanya, di Afrika sudah ada seratus juta orang dengan ransel siap untuk menyeberang ke Eropa. Tinggal menunggu kapan para pengungsi Rohingya, Bangladesh dan Afganistan akan menemukan Indonesia sebagai tempat pelarian (sekarang Indonesia masih dianggap tempat transit saja). Lalu ada masalah kedua: kapitalisme secara struktural tidak peduli dengan kerusakan lingkungan hidup. Persoalannya, perhatian pada keutuhan alam membuat biaya produksi menjadi mahal dan karena itu tidak masuk akal dari sudut pandang kapitalisme.

Tantangan yang keempat adalah akibat-akibat mengerikan perubahan iklim dan keambrokan lingkungan hidup alami. Sekarang saja sudah terlihat jelas bahwa kita, umat manusia, berada dalam bahaya besar. Terlihat bahwa umat manusia tidak akan berhasil mengambil kebijakan-kebijakan yang mutlak perlu diambil sampai tahun 2030 jika kita ingin mencegah terjadinya malapetaka-malapetaka besar. Jadi, malapetaka-malapetaka itu akan datang dan akan mulai dirasakan betul-betul sekitar 20 tahun lagi. Pemanasan atmosfer, kekeringan-kekeringan, naiknya permukaan laut, banjir-banjir yang semakin sering dan semakin meluas, kekurangan air bersih, serta pengotoran udara. Bisa amat mengerikan. Kemana

misalnya 30 juta orang Bangladesh akan mencoba melarikan diri jika 20 tahun lagi tanah mereka dicaplok oleh samudera Hindia? Dan bagaimana dengan Jakarta?

Tantangan kelima adalah perkembangan *artificial intelligence (AI)*. Yuval Noah Harari (2018) meramalkan dalam "*21 Lessons for the 21st century*" bahwa di tahun 2050 setengah dari umat manusia akan menjadi "*irrelevant*". Di Indonesia itu bisa berarti 140 juta orang dengan apa yang dimaksud dengan "*irrelevant*": Apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka hidup atau apakah mereka mati, apakah mereka bahagia atau marah, apa mereka bisa makan atau lapar, tidak perlu diperhatikan oleh 50 % masyarakat lain. Banyak pekerjaan sekarang, dan bukan hanya pekerjaan tangan, misalnya sebagai sopir taksi, dokter dan tenaga medis, tidak akan diperlukan lagi.

Tentu yang paling serius adalah siapa yang akan menetapkan algoritme-algoritme yang semakin akan menentukan segenap segi eksistensi kita? *AI* akan belajar bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi manusia secara paling lancar, paling efektif, paling baik (baik bagi siapa?). Apakah *AI* akan menjadi *der Weltgeist* Hegel - Roh Alam Raya – seperti disugestikan Roberto Simanowski (2021, *Todesalgoritmus*)?

Tiga Tantangan Bagi Kita di Indonesia

Semua tantangan global itu sepenuhnya akan menghantam Indonesia. Padahal kita mempunyai masalah-masalah sendiri yang sebagian memang berkaitan dengan masalah-masalah global, antara lain radikalisme agama, perpecahan vertikal, serta oligarki dan korupsi.

Radikalisme Agama

Radikalisme agama tak lain adalah pengambil-alihan agama oleh kepicikan manusia. Mereka menempatkan diri –mengerikan sekali– di tempat Tuhan. Siapa yang tidak sependapat dengan mereka dikafirkan. Bukan hanya yang dari agama berbeda, melainkan dari agama mereka sendiri. Mereka tak merasa malu melakukan kejahatan, sampai membunuh orang yang tidak bersalah hanya karena dianggap kafir. Kejadian seperti di Surabaya ketika satu keluarga – ayah, ibu dan anak-anak mereka – melakukan serangan maut atas suatu gereja, atau seperti yang terjadi pada bulan November 2022 saat seorang laki-laki, dengan berteriak *Allahhu Akbar*, membunuh seorang polisi lalu lintas di Belgia yang merupakan bagian dari ekstrem radikalisme.

Radikalisme agama lalu dapat menggerakkan populisme, ketika kata “kita“, “kita bangsa Indonesia“, diganti dengan “kami dan mereka“, dan “yang mereka“ dianggap musuh. Populisme merupakan ancaman serius bagi kesatuan suatu bangsa.

Perpecahan Vertikal

Ancaman yang malah lebih berbahaya adalah perpecahan vertikal. Kalau 50 % bangsa yang belum betul-betul sejahtera – bahkan 10 % masih sungguh-sungguh miskin - merasakan bahwa Indonesia hanya milik mereka yang di atas, kita akan berada *in deep troubles*. Jika Indonesia makin berkembang baik, dengan kereta api super-cepat, kota-kota besar cemerlang, pinggir-pinggir kali yang sudah “dibersihkan“ dari gubug-gubug liar, tetapi orang kecil merasa diabaikan dan digusur untuk memberi tempat bagi “mereka di atas“ itu, maka jangan heran jika mereka akan mengikuti ideologi-ideologi selain Pancasila.

Oligarki dan Korupsi

Ancaman ketiga adalah pengorupsian demokrasi kita. Bahwa revolusi para mahasiswa 24 tahun lalu berhasil menginstall demokrasi di Indonesia – akhirnya! – serta bahwa hak-hak asasi

manusia dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita adalah suatu prestasi luar biasa. Kita jangan membiarkan demokrasi itu dibongkar atau dirusak lagi.

Namun, demokrasi kita berada dalam bahaya. Betul, kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi apakah rakyat kita merasa diwakili oleh mereka? Kapan DPR bertanya apa yang dikehendaki rakyat? UU yang kritis cepat-cepat diputuskan dengan menghindari dari perdebatan umum, seperti misalnya UU ITE atau UU Cipta Kerja. Sebaliknya UUD anti-kekerasan seksual tak jadi-jadi. Dengan kenyataan bahwa hanya orang yang sekurangnya-kurangnya mampu membayar 5 milyar Rupiah bisa masuk DPR, dia atau harus pengusaha atau punya sponsor pengusaha. DPR perwakilan oligarki? Maka tidak mengherankan bahwa DPR bersama Pemerintah mengebiri KPK. Para wakil rakyat melindungi diri? Salah satu cacat amat serius demokrasi kita adalah bahwa tidak ada Kiri politik. Kalau kita bertanya, manakah partai yang mewakili tani kecil dan buruh tani, buruh industri, para pengusaha di kaki lima, para nelayan kecil, apalagi penduduk asli di daerah: tak ada jawaban. Demokrasi tanpa sayap kiri sebenarnya tidak ada. Dengan DPR semakin bersifat oligarki dan pelemahan pemberantasan korupsi demokrasi demokrasi kita berada dalam bahaya pembusukan.

Menghadapi Ancaman-Ancaman Abad ke-21

Berhadapan dengan ancaman dan tantangan luar biasa yang kita hadapi itu, kita bertanya: Apa Pancasila masih mempunyai gigi? Apa Pancasila dapat menunjuk arah untuk menghadapi tantangan-tantangan itu?

Dua pertimbangan pendahuluan: yang pertama, sekarang bukan tempatnya untuk bertanya bagaimana tantangan-tantangan itu harus ditangani, jadi kebijakan politis, ekonomis, sosial, teknologis dan lain-lain mana yang harus diambil berhadapan dengan ancaman-ancaman itu. Yang dituntut dari kita adalah komitmen-komitmen etis yang mutlak perlu kita pertahankan dan kita tanamkan ke dalam perpolitikan Indonesia agar kita dapat menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi yang perlu kita rumuskan adalah nilai-nilai, cita-cita dan sasaran etis mana yang kita tuntut dari pada *decision makers* dan yang tidak akan kita izinkan ditawar-tawar lagi. Jadi arahan dan tuntutan yang tidak akan kita lepaskan dalam mencari dan merumuskan kebijakan politis, ekonomis, teknologis yang mau kita ambil.

Dengan demikian muncul pertanyaan kedua: Apakah Pancasila dapat memberikan nilai-nilai, cita-cita dan sasaran-sasaran etnis yang tidak akan kita lepaskan itu, yang perlu kita pegang terus untuk tidak dilindas makin kita maju di abad ke-21? Apakah Pancasila masih ada kekuatan dalam kita semakin masuk ke abad ke-21 ini?

Dalam uraian berikut akan ditunjukkan bahwa justru Pancasila – asal kita berpegang betul padanya – memberikan arahan etis yang dapat membantu agar kita tidak sampai mengambil segala macam kebijakan yang akan lebih mengancam dan akhirnya menghancurkan Indonesia. Namun, pertama, mari kita sebentar mengingat apa yang sudah tercapai karena kita mendasarkan diri pada Pancasila.

Pancasila dan Identitas Indonesia

Mari kita bertanya: Untuk apa Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 melontarkan Pancasila di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)? Jawabannya jelas: Bukan sekedar sebagai cita-cita filosofis bagus, melainkan untuk menjawab suatu pertanyaan eksplosif: yaitu pertanyaan, apakah Indonesia harus didasarkan atas aturan sebuah agama atau menjadi negara kebangsaan sekuler? Mengapa pertanyaan ini muncul?

Tantangan paling besar bagi Indonesia adalah kemajemukannya. Indonesia – wilayah Nusantara – terdiri atas ribuan pulau dengan ratusan komunitas etnik, budaya dan agama, dengan lebih banyak bahasa ibu lagi. Bagaimana kemajemukan seperti itu mau mewujudkan satu bangsa? Banyak negara dengan situasi mirip – meski tidak seekstrem Indonesia – tidak

berhasil mengatasi tantangan itu. Mereka misalnya menetapkan bahasa, budaya, atau agama mayoritas sebagai bahasa dan budaya nasional. Seperti misalnya Myanmar, yang namanya dulu Birma, di mana bahasa suku mayoritas, ya suku Birma atau Bama, menjadi bahasa nasional. Sampai sekarang minoritas-minoritas di Myanmar berperang menuntut otonomi. Tetapi Indonesia memecahkan masalah itu dengan cemerlang dalam Sumpah Pemuda. Bukan mayoritas yang menentukan kebangsaan Indonesia, melainkan kebersamaan. Suatu kebersamaan yang terbentuk dalam perjuangan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kesadaran itu terungkap dengan mereka tidak memilih bahasa Jawa, melainkan bahasa Melayu - bahasa yang banyak dipakai dalam komunikasi antar pulau, tetapi yang pembicara aselinya kurang dari lima persen – sebagai bahasa Indonesia. Indonesia mendapat bahasa persatuan yang tidak mengungkapkan dominasi suatu mayoritas.

Ada satu pertanyaan serius muncul 17 tahun kemudian dalam pertemuan BPUPKI, yaitu: Indonesia yang satu itu mau mendasarkan diri pada nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan dasar mana? Satu kemungkinan adalah: atas dasar agama, ya agama Islam, agama mayoritas besar. Yang satu adalah suatu nasionalisme sekuler. Dalam situasi ini Bung Karno melontarkan jawabannya: Indonesia Merdeka bukan negara agama dan bukan negara sekuler, melainkan negara Pancasila! Sukarno berhasil merumuskan keyakinan-keyakinan dasar tentang kehidupan bersama yang dimiliki semua komunitas Indonesia yang begitu majemuk dalam lima prinsip atau sila, dalam Pancasila. Kita membaca bahwa pidato Bung Karno disambut dengan tepuk tangan besar. Rumusan rinci Pancasila kemudian dibahas bersama, dalam Panitia Sembilan dan lagi di bulan Juli dalam BPUPKI, dan mendapat bentuk definitif seperti yang ditetapkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Mengapa Pancasila begitu penting? Karena Pancasila memecahkan masalah yang dihadapi semua negara yang terdiri atas pelbagai komunitas etnik, budaya atau agama: Masalah identitas nasional. Bagaimana menemukan dan merumuskan identitas suatu bangsa yang terdiri atas banyak komunitas dengan identitas-identitas mereka masing-masing? Masalah itu yang dipecahkan dengan gemilang oleh Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mendasarkan diri bukan pada identitas suku terbesar atau komunitas agama terbesar, melainkan atas nilai-nilai dan cita-cita kehidupan yang dimiliki bersama oleh semua komunitas Indonesia. Dalam Indonesia yang berdasarkan Pancasila semua komunitas Nusantara, yang secara etnik, budaya dan agama begitu berbeda, menemukan suatu dasar kebersamaan yang mereka miliki bersama. Dengan demikian Indonesia mencapai sesuatu yang mengelak dari banyak negara sampai sekarang: Bahwa identitas nasional, ya identitas sebagai manusia Indonesia, tidak menekan dan mengancam, melainkan sebaliknya melindungi dan mengangkat identitas etnik, budaya dan agama masing-masing komunitas. Di Indonesia orang Indonesia merasa bangga karena dia orang Indonesia justru sebagai orang Bugis, sebagai orang Minang, sebagai orang Jawa atau sebagai orang Manggarai. Orang Islam Indonesia tak perlu memotong apa pun dari keislamannya dengan menjadi Indonesia dan orang Katolik bisa “100 persen Katolik dan 100 persen Indonesia” (rumusan alm. Mrg. Albertus Soegijapranata). Oleh karena itu persatuan Indonesia begitu kuat. Jati diri bangsa mendukung jati diri masing-masing komunitas, dan jati diri masing-masing komunitas mendukung jati diri Indonesia.

Namun, sekarang kita berhadapan dengan pertanyaan: Apakah Pancasila yang sejak lebih dari 70 tahun mendasari persatuan Indonesia mencukupi agar bangsa Indonesia menjaga dan memastikan identitas dan persatuannya, serta kemajuannya, berhadapan dengan tantangan-tantangan amat serius yang, seperti sudah disebut, kita hadapi semakin kita masuk ke abad ke-21?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu kita perhatikan sesuatu yang jarang mendapat perhatian: Pancasila bukan hanya etika dan keyakinan hidup bersama bangsa Indonesia yang berakar dalam nilai-nilai tradisi-tradisi Indonesia, melainkan sekaligus mendukung dan meyakini keyakinan-keyakinan etika politik pasca tradisional umat manusia sekarang.

Pancasila dan Etika Politik Pasca Tradisional

Pancasila memang berakar dalam tradisi-tradisi Nusantara sejak ratusan tahun dan justru karena itu Pancasila dapat mempersatukan Indonesia. Pancasila bukan barang impor. Religiusitas yang terbuka dan toleran, kemanusiaan yang adil dan memperlihatkan diri dalam sikap-sikap beradab, kebersatuan sebagai buah perlawanan bersama terhadap penjajahan, kemampuan tradisional untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tidak melalui pola menang-kalah, melainkan dalam bicara bersama sampai kesepakatan tercapai, serta keyakinan mendalam bahwa hidup bersama harus adil, bahwa tidak ada yang boleh diizinkan ketinggalan, bahwa "kita senasib sepenanggungan" - itulah kekayaan budaya-budaya Nusantara yang bersatu menjadi Indonesia.

Namun, yang jarang diperhatikan, dan semakin mengagumkan, adalah kenyataan bahwa Bung Karno dalam Pancasila sekaligus mengangkat keyakinan-keyakinan paling dasar etika politik pasca-tradisional, etika modernitas. Mengapa Bung Karno seakan-akan secara spontan mengangkat keyakinan-keyakinan dasar tradisi-tradisi Indonesia yang sekaligus menjadi kesepakatan global tentang bagaimana negara-negara pasca-tradisional harus membawa diri? Secara sangat sederhana: Etika politik seperti misalnya termuat dalam pelbagai pernyataan hak-hak asasi manusia dan dalam pembukaan undang-undang dasar pelbagai negara, mempunyai empat keyakinan paling dasar, yaitu: Kehidupan bersama, dan dengan demikian negara, wajib menjamin empat pokok: Kebebasan beragama, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial, itu pun dalam kerangka negara kebangsaan. Amat mencolok bahwa empat pokok etika politik pasca-tradisional itu terungkap dalam empat sila Pancasila:

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan jelas memuat keyakinan paling dasar modernitas, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal mana sekaligus membawa kewajiban untuk menghormati kemajemukan keyakinan agama dan relijius yang terdapat dalam masyarakat, jadi kewajiban berat untuk menjamin toleransi beragama. *Sila kedua* mengungkapkan harkat kemanusiaan universal yang terungkap dalam jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan dalam penolakan prinsipil terhadap penyelesaian suatu konflik dengan cara kekerasan. *Sila keempat* sudah jelas mengungkapkan keyakinan modernitas sangat mendasar akan hak rakyat untuk sendiri menentukan siapa yang memimpinya dan ke mana ia mau dipimpin, d.l.k. keyakinan akan demokrasi. Kemudian *sila kelima* secara eksplisit mengungkapkan keadilan sosial sebagai tuntutan universal, sebagai keyakinan bahwa umat manusia terikat oleh solidaritas sebagai kewajiban untuk tidak mengizinkan sebagianarganya tertinggal dalam kemiskinan, penderitaan dan keterlantaran, jadi bahwa pewujudan keadilan sosial harus menjadi tujuan pertama suatu perpolitikan yang beradab.

Bagaimana dengan *sila ketiga*? Sila ke-tiga yang mengangkat tekad bangsa Indonesia untuk bersatu mencerminkan kenyataan bahwa dunia pasca-tradisional ditata dalam *nation-state*, jadi tidak berdasarkan kesukuan, tradisi feodal atau ideologi. Negara kebangsaan berarti bahwa itu "negara kita", bukan "negara mereka", bukan "negara kaum bangsawan", bukan sekedar organisasi administratif.

Bisa dikatakan: dengan mendasarkan Indonesia pada Pancasila para *founding fathers* menyatakan tekad mereka bahwa Indonesia di satu pihak hanya bisa bersatu apabila setia pada nilai-nilai kemanusiaan yang sudah sejak ratusan tahun mereka hayati, di lain pihak bahwa mereka menghendaki suatu Indonesia yang menjadi negara bermartabat yang semodern-modern.

Ini menunjukkan sesuatu yang amat penting: Pancasila itu *no way out of date*, dalam arti apa pun Pancasila tidak ketinggalan zaman. Pancasila justru di zaman pasca-tradisional mengangkat segi-segi paling hakiki kemanusiaan yang mutlak perlu dipertahankan supaya di alam pasca-tradisional martabat manusia tetap dihormati dan kehidupan bersama tetap menunjang harkat kemanusiaan segenap orang.

Namun di sini pembaca kiranya sudah mencatat bahwa ada dua dari lima tantangan yang disebut pada awal tulisan ini yang belum terangkat: Ancaman keambrokan daya tahan alam, dan *artificial intelligence*. Dan memang demikian. Waktu Pancasila dirumuskan, *AI* belum ada di cakrawala kesadaran manusia. Begitu pula, kesadaran bahwa ada bahaya bahwa manusia dapat menghancurkan alam daripadanya ia hidup baru muncul sejak tahun 60-an abad yang lalu. Jadi tidak termuat dalam Pancasila.

Mengenai ancaman keambrokan daya tahan alam: yang jelas, apabila kita tidak berhasil mempertahankan kenaikan suhu atmosfer pada 1,5 derajat, akan terjadi malapetaka global luar biasa. Sekarang saja perubahan iklim berdampak pada cuaca yang ekstrem yang sejak beberapa tahun semakin sering terjadi, tambah dengan ancaman pengotoran sungai-sungai dan laut dengan plastik di mana mikroplastik sekarang sudah makin sering ditemukan dalam ikan yang kita makan, dan segala macam peracunan lain.

Dapat ditanyakan: Di mana dalam kerangka Pancasila perhatian pada keutuhan alam dapat ditempatkan? Kiranya jawabannya tidak terlalu sulit. Usul saya, perhatian pada kesehatan dan keutuhan alami ditempatkan dalam sila yang kedua. Mengapa? Manusia yang beradab mesti bersikap beradab bukan hanya terhadap manusia lain tetapi juga terhadap alam. Alam pun wajib kita pergunakan secara beradab. Jadi alam tidak kita tangani secara primitif menurut model “dipakai dan dibuang”. Pancasila dapat dimengerti sebagai tuntutan agar kita, manusia, menangani alam secara beradab. Jadi dengan cara yang tidak mengotori dan merusak bumi, melainkan menjaga dan melindunginya.

Pancasila: Dasar Komitmen-komitmen bagi Abad ke-21

Membuat nyata implikasi lima sila Pancasila tidak mudah, apalagi berhadapan dengan *AI*. Tak dapat diragukan: *AI* akan semakin menentukan segenap sudut kehidupan kita. Secara sederhana itu berarti: Semakin banyak sikap dan keputusan yang harus kita ambil dalam hidup sehari-hari – misalnya apa perlu pemeriksaan dokter, buku mana sebaiknya kita baca, kita liburan ke mana – akan diambil alih oleh *AI*. *AI* bekerja melalui algoritme yang bagi segenap sasaran menetapkan langkah-langkah optimal untuk mencapainya. *AI* menemukan langkah-langkah paling efisien berdasarkan *big data*, artinya, dengan memperhatikan bilyunan informasi dari seluruh dunia, serta menerjemahkan langkah-langkah itu ke dalam realitas. Kalau misalnya kita mencari pacar lewat google, jangan-jangan pada pagi di keeokan harinya pacar itu sudah mengetok pada pintu kita.

Berhadapan dengan *AI* itu amat penting bahwa kita memasukkan ke dalam algoritme-algoritme itu perintah bahwa segenap kebijakan yang diambil harus sesuai dengan keyakinan-keyakinan etis yang tidak kita tawar-tawar. Misalnya, secara (terlalu) sederhana: Bahwa segenap masalah ekonomis yang kita cari pemecahannya harus adil. Sehingga pemecahan-pemecahan yang tidak adil ditolak oleh *AI*, berarti tidak diizinkan masuk ke dalam algoritme-algoritme. Bagaimana perintah kesesuaian pemecahan masalah secara etis dapat diefektifkan: Dengan menetapkan, secara politis, konstitusional dan hukum, bahwa segenap tindakan politis – politis dalam arti luas: politik sendiri, ekonomis, budaya, misalnya pendidikan, dll. – harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita rumuskan.

Di sini Pancasila masuk. Pancasila memuat keyakinan-keyakinan etis menyeluruh yang kalau menjadi nyata, menjamin kehidupan bersama kita maupun komunikasi kita dengan seluruh dunia yang secara optimal sesuai dengan martabat dan keselamatan segenap manusia. Jadi Pancasila bukan sebagai semacam hiasan filosofis, melainkan sebagai dasar suatu *set of ethical principles* yang tidak ditawar-tawar.

Pancasila sebagai Etika Bangsa yang Tak Dapat Ditawar-tawar

Bagaimana kita menerjemahkan lima sila atau prinsip Pancasila ke dalam realitas sosial-politik bangsa Indonesia tentu harus terus menerus disepakati dalam diskursus demokratis. Diskursus itu amat penting, dan amat perlu diskursus itu dilaksanakan terus, dilatih, dan segenap usaha, misalnya oleh pemerintah, untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat harus tegas-tegas ditolak sebagai sabotase terhadap Pancasila.

Berikut ini, sebagai sumbangan bagi diskursus itu, ditawarkan beberapa komitmen yang tidak boleh ditawar-tawar, yang berdasarkan lima sila Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa:

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan hanya dapat bersatu kalau saling menghormati dan mengakui kemajemukan itu. Dan itu berarti, kita menghormati dan mengakui kemerdekaan segenap komunitas dan manusia Indonesia untuk beragama dan berkepercayaan menurut apa yang mereka yakini sendiri. Bukan hanya itu. Hanya dengan menghormati kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kita menghormati kedaulatan Ilahi yang mengizinkan manusia dengan agama dan kepercayaan berbeda hidup di dunia ini. Berulang kali di negara kita terjadi tindak kekerasan intoleransi yang jelas kriminal, namun dibiarkan. Peristiwa Mempawah, Cikeusik, banyak peristiwa di sana sini: Asal muncul massa beringas, orang-orang beragama dengan mulut berbusa kebencian, alat negara mundur. Masih juga umat Ahmadiyah dan Syiah dijalmi tanpa negara bertindak. Padahal di Pembukaan UUD ditulis dengan jelas bahwa "pemerintah negara Indonesia ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia..." Kita jangan mengizinkan pemerintah kita tunduk terhadap kebringasan dan kebencian.

Maka Ketuhanan Yang Maha Esa membawa implikasi:

- Nirtoleransi terhadap intoleransi
- Jaminan efektif terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Pancasila yang kedua jelas berfokus pada martabat manusia, maka dengan sendirinya, dan pertama-tama, dituntut hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Bahwa akhirnya reformasi memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang dasar kita kiranya merupakan kemajuan luar biasa karena hanya dengan jaminan hak-hak asasi manusia martabat segenap tumpah darah bangsa Indonesia dapat terjamin. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia bukan tanda individualisme – seperti dikumandangkan para pendukung feodalisme dari Supomo sampai dengan Orde Baru – melainkan bukti kesediaan untuk menghormati dan mengakui martabat segenap orang entah besar entah kecil, entah kaya, entah miskin, sebagai manusia.

Sila kedua Pancasila menuntut agar segenap orang diperlakukan dengan adil. Dan secara beradab. Beradab berarti: Suatu konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dengan musyawarah, dan seperlunya dengan jalan hukum. Beradab juga terhadap alam. Maka sila kedua juga menuntut penolakan kekerasan terhadap alam. Alam pun wajib diperlakukan secara beradab. Sila kedua itu menuntut agar kita jangan ikut mengotori dan merusak alam, mengurangi penggunaan plastik, mengurus sampah secara efektif dan bersih, menghemat listrik, dlsb.

Maka implikasi sila kedua dapat dirumuskan dalam empat komitmen:

- Penolakan prinsipil terhadap penyelesaian konflik dengan kekerasan; konflik yang muncul diselesaikan dengan musyawarah, dan kalau musyawarah tidak berhasil, dengan jalan hukum.
- Penolakan prinsipil terhadap perang sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah antara negara.
- Penolakan segenap kebijaksanaan yang melanggar hak-hak asasi manusia.
- Penolakan segenap kebijaksanaan yang mengancam kelestarian alam.

Persatuan Indonesia

Sila ini menyatakan bahwa Indonesia adalah “milik kita”, tanggungjawab kita, kebersamaan kita, cara kita berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu korupsi, pemerkayaan diri dengan mencuri apa yang merupakan milik kita bersama, merupakan pelanggaran berat terhadap sila ketiga Pancasila. Begitu pula segenap ideologi yang meremehkan atau mengabaikan komitmen pada bangsa harus ditolak. Maka sila ketiga Pancasila dapat dirumuskan dalam tiga komitmen:

- Korupsi harus dihukum berat.
- Ideologi-ideologi, baik sekuler maupun agamis, yang mengabaikan, apalagi mengancam, kebangsaan, harus ditolak.
- Begitu pula neo-liberalisme sebagai ideologi perekonomian yang semata-mata mengejar keuntungan pelaku individual tanpa memperhatikan dampak pada seluruh bangsa harus ditolak.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Masih ada saja suara-suara dari mantan pendukung Orde Baru yang menyesalkan sistem *one man one vote* dan menganggap hak-hak asasi sebagai kemenangan individualisme. Ratapan para mantan Orde Baru itu perlu ditolak. Jangan kita biarkan lagi kekuasaan diambil dari tangan rakyat. Hakekat kolonialisme dulu adalah bahwa kekuasaan tidak di tangan rakyat. Feodalisme orde baru merupakan perpanjangan penjajahan dulu di mana rakyat dikuasi oleh orang-orang yang menganggap diri elit. Sila keempat membawa lima implikasi berikut:

- Komitmen pada demokrasi.
- Masalah yang menyangkut banyak warga harus dibicarakan bersama.
- Prinsip *one person one vote* tidak boleh dicairkan lagi.
- Negara harus berdasarkan hukum, hukum yang menjamin hak-hak asasi manusia.
- Penolakan pemerintahan feodal, militer, hegemonial, otoriter.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ini komitmen yang paling menentukan. Kita tidak mau maju, kalau tidak semua maju. Kita tidak mau sukses kalau masih ada saudara dan saudara sebangsa yang tidak aman, miskin, terlantar. Kalau kita maju, saudara dan saudara miskin pun harus berpartisipasi, harus mendapat harapan. Karena itu kita mendukung perjuangan kaum buruh, petani dan nelayan kecil, masyarakat aseli di hutan-hutan, perjuangan puluhan juta orang yang hidup dari kaki lima. Senasib sepenanggungan. Radikalisme agama tidak akan mendapat pengikut banyak apabila segenap tumpah darah Indonesia merasa terjamin dalam solidaritas nyata bangsa.

Beberapa implikasi:

- Perlu dijamin bahwa tak ada manusia Indonesia kelaparan.

- Prioritas pembangunan, bahkan perpolitikan Indonesia harus diberi pada penghapusan kemiskinan dan keterlantaran dan tercapainya kesejahteraan bagi segenap warga dan daerah Indonesia.
- Penolakan terhadap ekonomi yang mengikuti neo-liberalisme.
- Penolakan terhadap etatisme di mana negara yang menentukan segala-galanya.

PENUTUP

Kiranya sudah jelas: Pancasila sama sekali tidak ketinggalan zaman. Asal kita berpegang pada Pancasila serta bersedia untuk menjamin implikasi-implikasinya kita boleh mengharapkan bahwa kita akan berhasil menghadapi tantangan-tantangan, baik yang global, maupun kelemahan-kelemahan kita sendiri di Indonesia, dengan menjamin masa depan bangsa yang merdeka, sejahtera, adil dan terhormat. Tetapi kita memang harus bertekad begitu.

Daftar Pustaka

Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. Free Press

Harari, Yuval Noah. 2018. *21 Lessons for the 21st Century*. Random House.